

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PEREKRUTAN SEBAGAI TENAGA
KERJA KE LUAR NEGERI
DI WILAYAH HUKUM *POLDA SUMATERA BARAT*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

AZIZAH PUTRI CHEISA

2210111053

Program Kekhususan: Hukum Pidana (IV)



Pembimbing:

Yandriza, SH. MH.

Dr. Siska Elvandari, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Azizah Putri Cheisa	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 12 Maret 2004 b. Nama Orangtua : Zulkamaini & Rahmi c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210111053	f. Tanggal Lulus : 01 Juli 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3,88 j. Alamat : Komp. Pegambiran Pemai Blok T No. 1, Kcc. Lubuk Begalung Kota Padang	

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PEREKRUTAN SEBAGAI TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI DI WILAYAH HUKUM *POLDA SUMATERA BARAT*

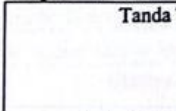
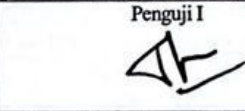
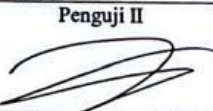
(Azizah Putri Cheisa, 2210111053, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 84 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* masih jauh dari harapan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum fundamental terhadap korban secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tetapi, dalam pelaksanaannya hak-hak korban yang terpenuhi tidak menyeluruh. Hak-hak korban yang dipenuhi oleh Polda Sumbar hanya yang bersifat prosedural tidak dengan hak yang fundamental. Sistem pemidanaan di Indonesia masih berfokus pada kejahatan pada sudut pandang pelaku serta mengabaikan sudut pandang korban sebagai pihak yang dirugikan. Peristiwa ini pula yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan terhadap sudut pandang korban. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja ke luar negeri, 2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan tenaga kerja ke luar negeri di wilayah hukum polda Sumatera Barat terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kendala yang dihadapi oleh pihak polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang terdiri atas Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat yang membuat Masyarakat tidak memahami alur yang seharusnya ditempuh oleh calon pekerja migran Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Minimnya kesadaran Masyarakat membuat timbulnya sikap apatis serta stigma *negative* berupa *victim blaming* kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Proses pemulihan korban yang rumit memuat terlambatnya pelaksanaan perlindungan terhadap korban sehingga hal ini mampu membuat trauma psikologis korban semakin dalam, dan Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Polda Sumatera Barat terkhususnya Unit 2 Subdit 4 TPPO diharapkan lebih membangun koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan antara kepolisian dengan kejaksaan dan pengadilan, untuk merevolusi pola pikir hukum yang berorientasi pada prinsip *offender oriented*, meningkatkan Kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan evaluasi terhadap laporan-laporan yang belum ditindaklanjuti untuk menghindari penumpukan perkara.

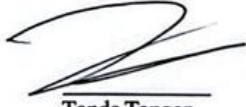
Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Korban, Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 01 Juli 2026

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Azizah Putri Cheisa	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni		Azizah Putri Cheisa		No. Faculty Alumni	
	a.	Place/Date of Birth	: Padang/ March 12 th 2004		f.	Graduation Date
	b.	Parent's Name	: Zulkamaini & Rahmi		g.	Pass Predicate
	c.	Faculty	: Law		h.	Length of Study
	d.	Concentration	: Criminal Law		i.	GPA
	e.	Student ID	: 2210111053		j.	Address
						: Komp. Pegambiran Pernai Blok T No. 1, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang.

Legal Protection for Victims of Human Trafficking Involving Recruitment for Overseas Employment: A Study Within the Jurisdiction of the West Sumatra Regional Police

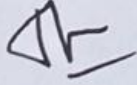
Azizah Putri Cheisa, 2210111053, Criminal Law, Faculty of Law, Andalas University, 84 pages, 2026.

ABSTRACT

Legal protection afforded to victims of the criminal offence of human trafficking remains substantially below the standards envisaged by the prevailing laws and regulations. Comprehensive legal protection for victims is fundamentally governed by Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Nevertheless, in its implementation, the fulfilment of victims' rights has not been comprehensive. The protection provided by the West Sumatra Regional Police (Polda Sumatera Barat) has been limited primarily to procedural rights, while the victims' substantive rights have not been fully realized. Moreover, Indonesia's criminal justice system continues to adopt an offender-oriented approach, placing greater emphasis on the prosecution and punishment of offenders while paying insufficient attention to victims as the parties who have suffered harm. This condition has resulted in an imbalance between the protection of offenders' rights and the protection of victims' rights. This research addresses two principal issues: (1) how legal protection is provided to victims of the criminal offence of human trafficking through the modus operandi of recruitment for overseas employment; and (2) the obstacles encountered by the West Sumatra Regional Police in providing such legal protection. This study employs a sociological juridical (empirical legal) approach with a descriptive research design, utilizing both primary and secondary data. The findings demonstrate that legal protection for victims of the criminal offence of human trafficking through the recruitment of workers for overseas employment within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police comprises both preventive and repressive legal protection. However, the implementation of such protection is impeded by several factors, namely: the low level of public education, which results in a lack of understanding regarding the lawful procedures that prospective Indonesian migrant workers are required to follow under the applicable laws and regulations; limited public awareness, which gives rise to apathetic attitudes and negative social stigma, including victim blaming directed at victims of human trafficking; the complexity of the victim repatriation process, which delays the provision of legal protection and consequently exacerbates the victims' psychological trauma; and inadequate coordination among law enforcement agencies. Accordingly, it is recommended that the West Sumatra Regional Police, particularly Unit 2 of Sub-Directorate IV for the Crime of Human Trafficking (TPPO), strengthen systematic and sustainable coordination with the Public Prosecutor's Office and the judiciary in order to promote a paradigm shift from an offender-oriented criminal justice system towards a more victim-oriented approach. Furthermore, greater institutional cooperation with the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) should be enhanced, and periodic evaluations of unresolved reports should be conducted to prevent the accumulation of pending cases and to ensure more effective legal protection for victims of human trafficking.

Keywords: Human Trafficking, Legal Protection, Victims, Overseas Employment, Migrant Workers.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at July 01st 2026.

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Azizah Putri Cheisa	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name: Signature:
No. Alumni University	Name: Signature: